

PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BANJIR: STRATEGI AKUNTANSI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA

Harningsih Fitri Situmorang

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email: harningsihfitri@umsu.ac.id

Abstract

Medan City, as the capital of North Sumatra, is highly susceptible to perennial flood disasters that pose significant fiscal risks and economic disruption. This study examines the strategic role of public sector accounting in mitigating economic impacts and facilitating post-disaster recovery in Medan. Adopting a Systematic Literature Review (SLR) methodology, the research synthesizes academic journals and official reports published between 2020 and 2025. The analytical framework incorporates the Value for Money (VFM) principle, economic vulnerability analysis, and emergency fund effectiveness models. The findings reveal that the economic causes of flood impacts are rooted in high vulnerability within MSME clusters and inadequate asset impairment records. Strategic management through the optimization of Unexpected Expenditures, simplified bureaucratic accounting for aid distribution, and the implementation of disaster-risk-based budgeting is essential. This study concludes that disaster accounting acts as a vital pillar for regional fiscal resilience and public accountability, ensuring sustainable economic recovery for the people of Medan.

Keyword: Disaster Accounting, Economic Recovery, Medan City, Public Sector, Value for Money

PENDAHULUAN

Kota Medan merupakan episentrum pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Bagian Utara yang memiliki kompleksitas risiko ekologis yang tinggi. Secara geografis, kota ini dilalui oleh tujuh sungai besar, termasuk Sungai Deli dan Sungai Babura, yang secara periodik meluap dan mengakibatkan banjir bandang di berbagai kecamatan seperti Medan Maimun, Medan Johor, dan Medan Labuhan. Dalam perspektif ekonomi dan akuntansi sektor publik, fenomena banjir di Medan bukan sekadar bencana alam, melainkan sebuah variabel risiko fiskal yang dapat mendestabilisasi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Gangguan pada aktivitas perdagangan, kerusakan aset tetap pemerintah, serta lumpuhnya operasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menciptakan kerugian ekonomi yang masif dan sering kali tidak terukur secara presisi dalam laporan keuangan daerah.

Transformasi paradigma dalam manajemen bencana (2020–2025) menuntut pergeseran dari sekadar respons darurat menuju ketahanan ekonomi yang terencana. Di sini, peran akuntansi sektor publik menjadi pemecah masalah. Akuntansi tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pencatatan transaksi pasif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mitigasi risiko ekonomi melalui penyediaan data yang akurat untuk pengambilan keputusan fiskal. Masalah utama yang sering muncul di Pemerintah Kota Medan adalah bagaimana mengelola dana Belanja Tidak Terduga secara transparan dan akuntabel di tengah urgensi pemulihan ekonomi. Hambatan birokrasi dan kerumitan verifikasi dokumen sering kali menjadi penghambat utama dalam distribusi bantuan modal bagi masyarakat terdampak.

Penelitian ini menjadi sangat relevan mengingat Kota Medan baru saja menghadapi banjir besar di penghujung tahun 2024 dan awal 2025 yang memaksa realisasi anggaran belanja tidak terduga mencapai angka ratusan miliar rupiah. Dengan merujuk pada teori kerentanan ekonomi dan prinsip Value for Money, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi akuntansi dapat dioptimalkan sebagai alat penanggulangan dampak ekonomi banjir. Fokus pembahasan dibatasi pada aspek akuntabilitas keuangan publik dan strategi fiskal daerah tanpa memasuki ranah teknis hidrologi, guna memastikan kajian ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik dan kebijakan ekonomi daerah di Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review dengan pendekatan naratif-argumentatif yang komprehensif. Metodologi ini dipilih untuk mensintesis berbagai temuan riset dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik akuntansi bencana dan pemulihan ekonomi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2025). Proses SLR dilakukan melalui empat tahap sistematis. Pertama, identifikasi sumber data primer yang mencakup jurnal terakreditasi SINTA dan database global seperti Google Scholar, dengan fokus pada kata kunci Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Risiko Bencana, dan Pemulihan Ekonomi Medan.

Kedua, seleksi literatur didasarkan pada kriteria inklusi yang ketat, di mana hanya artikel yang membahas dimensi ekonomi dan keuangan bencana yang dianalisis. Argumen utama dalam penelitian ini divalidasi dengan membandingkan model-model empiris yang telah ada, seperti model efektivitas dana darurat dan analisis kerentanan ekonomi kawasan. Ketiga, pengintegrasian data sekunder dari laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2025 untuk memberikan konteks empiris yang kuat. Tahap terakhir adalah sintesis naratif yang menghubungkan teori akuntansi sektor publik dengan realitas kebijakan penanggulangan banjir di Kota Medan, guna merumuskan rekomendasi strategi akuntansi yang aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penyebab Dampak Ekonomi: Kerentanan Kawasan di Kota Medan

Penyebab utama dari besarnya kerugian ekonomi akibat banjir di Medan berakar pada tingginya indeks kerentanan ekonomi di wilayah-wilayah produktif. Mengacu pada kerangka analisis kerentanan ekonomi, Kota Medan memiliki konsentrasi aktivitas ekonomi yang sangat padat di daerah aliran sungai. Sebagian besar pelaku UMKM di wilayah Medan Maimun dan Medan Labuhan tidak memiliki cadangan modal bencana dan sistem asuransi aset yang memadai. Secara akuntansi, hal ini menciptakan risiko impairment (penurunan nilai) aset secara masal setiap kali banjir melanda.

Dalam perspektif strategi akuntansi, penyebab kegagalan pemulihan ekonomi yang cepat sering kali disebabkan oleh tiadanya inventarisasi aset yang berbasis risiko bencana. Pemerintah daerah sering kali kesulitan memetakan berapa besar modal kerja yang hilang di masyarakat karena sistem pelaporan keuangan yang ada masih bersifat tradisional dan belum mampu menangkap dinamika kerugian ekonomi mikro secara real-time. Oleh karena itu, strategi mitigasi awal yang harus dilakukan adalah melalui pengembangan akuntansi sosial-ekonomi yang mampu mengukur derajat kerentanan setiap klaster ekonomi di Medan.

Penanggulangan Melalui Prinsip Value for Money (VFM)

Penanggulangan dampak ekonomi banjir di Kota Medan menuntut efisiensi belanja yang tinggi, yang dapat diukur melalui prinsip Value for Money (VFM). Berdasarkan analisis kinerja keuangan instansi penanggulangan bencana (Meitri, 2022), kinerja BPBD dan instansi terkait di Medan harus dievaluasi melalui tiga dimensi: Ekonomis, Efisien, dan Efektif. Dimensi ekonomis menekankan pada pengadaan logistik pascabencana dengan biaya yang rasional tanpa mengurangi kualitas.

Efisiensi diukur dari seberapa cepat sumber daya yang ada mampu dikonversi menjadi output berupa perbaikan infrastruktur ekonomi seperti pasar dan jalan. Sementara itu, efektivitas merupakan poin paling krusial, di mana dana penanggulangan banjir harus mampu membangkitkan kembali daya beli masyarakat dan produktivitas UMKM. Tantangan di Kota Medan sering kali muncul pada dimensi efisiensi, di mana proses birokrasi akuntansi yang kaku menghambat aliran dana penanggulangan dari kas daerah ke masyarakat terdampak, sehingga memperlama masa stagnasi ekonomi pascabencana.

Strategi Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Efektivitas Dana Darurat

Pengelolaan dana belanja tidak terduga merupakan instrumen utama dalam strategi akuntansi pemulihan ekonomi di Medan. Seiring dengan realisasi belanja tidak terduga yang mencapai Rp174,5 miliar pada tahun anggaran 2025, tuntutan akan transparansi menjadi mutlak. Mengacu pada model efektivitas dana darurat (Muhammad & Rachman, 2025), efektivitas pemulihan ekonomi warga sangat bergantung pada kemudahan verifikasi dokumen akuntansi. Dalam banyak kasus di Medan, pelaku usaha kehilangan dokumen fisik aset mereka saat banjir, yang secara administratif menghambat mereka dalam mengakses bantuan pemerintah.

Strategi penanggulangan yang diusulkan adalah implementasi Akuntansi Bencana Digital. Dengan digitalisasi laporan aset dan dokumen keuangan, verifikasi pascabencana dapat dilakukan secara lebih cepat melalui sistem cloud-based accounting. Hal ini akan meminimalisir hambatan birokrasi dan memastikan bahwa stimulus ekonomi dapat disalurkan tepat waktu sebelum usaha masyarakat mengalami kebangkrutan permanen. Akuntabilitas publik dalam hal ini tidak hanya diukur dari ketaatan administratif, tetapi dari seberapa besar dana belanja tidak terduga mampu mencegah penurunan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pencatatan Penurunan Nilai Aset dan Pelaporan Kerugian Ekonomi

Salah satu peran krusial akuntansi sektor publik dalam pemulihan di Medan adalah pengakuan dan pelaporan penurunan nilai aset daerah. Banjir bandang yang merusak jembatan, gedung sekolah, dan fasilitas umum lainnya harus segera dihitung nilai kerusakannya dan dicatatkan dalam neraca pemerintah daerah sebagai penurunan nilai aset (impairment). Tanpa pelaporan yang jujur dan transparan mengenai kondisi aset pascabencana, perencanaan anggaran untuk rekonstruksi akan menjadi tidak valid.

Pelaporan kerugian ekonomi yang komprehensif juga menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Medan untuk mengajukan Dana Alokasi Khusus atau bantuan dana siap pakai dari pemerintah pusat. Strategi akuntansi di sini berfungsi sebagai alat advokasi fiskal. Dengan menyajikan data keuangan yang valid mengenai besaran kerugian aset produktif, Pemko Medan memiliki argumen yang kuat untuk mendapatkan dukungan finansial eksternal guna mempercepat proses pemulihan infrastruktur ekonomi yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat.

Akuntansi sebagai Instrumen Ketahanan Ekonomi Daerah

Dalam jangka panjang, strategi akuntansi di Kota Medan harus bergeser menjadi instrumen ketahanan (resilience). Hal ini mencakup pembentukan Dana Cadangan Bencana

yang dikelola secara profesional dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akuntansi memberikan alat prediksi melalui analisis data historis biaya banjir tahunan untuk menentukan besaran premi risiko yang harus disisihkan setiap tahunnya. Selain itu, pengembangan skema asuransi barang milik daerah (ABMD) merupakan langkah strategis untuk mengalihkan beban fiskal akibat banjir kepada pihak ketiga.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik yang tinggi akan meningkatkan profil risiko kredit daerah di mata lembaga keuangan dan investor. Kota Medan yang mampu mendemonstrasikan manajemen risiko bencana yang terintegrasi dalam laporan keuangannya akan lebih mudah menarik investasi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, akuntansi sektor publik bertransformasi dari sekadar pencatatan menjadi motor penggerak stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Medan di tengah ketidakpastian iklim.

Sinergi Koordinasi Antarlembaga dalam Akuntabilitas Dana Bencana

Koordinasi antarlembaga merupakan prasyarat mutlak dalam menciptakan sistem akuntansi bencana yang akuntabel di Kota Medan. Berdasarkan analisis terhadap hambatan administrasi yang ditemukan dalam studi Muhammad & Rachman (2025), kegagalan percepatan pemulihan ekonomi sering kali berakar pada ego sektoral dan fragmentasi data keuangan antar Organisasi Perangkat Daerah. Di Medan, keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum dalam penanganan banjir sering kali menghasilkan pelaporan keuangan yang tumpang tindih. Ketidaksinkronan data ini tidak hanya menciptakan inefisiensi anggaran, tetapi juga mempersulit proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas penggunaan dana darurat.

Secara teoretis, strategi akuntansi penanggulangan harus mampu mengintegrasikan seluruh aliran kas bencana ke dalam satu sistem pelaporan yang terpusat. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa bantuan modal bagi UMKM di Medan sering kali tertunda karena proses verifikasi data yang berulang-ulang di tingkat dinas yang berbeda. Dengan mengadopsi prinsip transparansi, Pemerintah Kota Medan perlu mengimplementasikan Integrated Disaster Financial Report (IDFR). Sistem ini akan menyatukan data pengeluaran dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah secara real-time, sehingga transparansi fiskal dapat terjaga dan risiko penyelewengan dana dapat ditekan seminimal mungkin. Lebih lanjut, sinergi ini berdampak langsung pada kecepatan distribusi stimulus ekonomi bagi warga terdampak banjir di Medan Maimun dan Medan Johor. Akuntabilitas yang terfragmentasi cenderung menciptakan prosedur birokrasi yang panjang dan melelahkan bagi masyarakat. Strategi akuntansi yang kolaboratif akan menyederhanakan rantai birokrasi tersebut melalui sistem validasi data tunggal. Hal ini memastikan bahwa bantuan finansial sampai ke tangan pelaku usaha tepat pada saat mereka membutuhkannya untuk memulihkan modal kerja yang hilang akibat rendaman banjir.

Dalam konteks akuntabilitas publik, koordinasi yang baik juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah (Good Local Governance). Kepercayaan masyarakat Medan terhadap pemerintah sangat bergantung pada seberapa transparan aliran dana bantuan dikelola. Jika pelaporan keuangan antarlembaga terlihat carut-marut, hal tersebut akan memicu skeptisisme publik dan menurunkan partisipasi swasta dalam program pemulihan melalui CSR. Oleh karena itu, akuntansi bukan lagi sekadar alat pencatatan intern, melainkan jembatan komunikasi koordinatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi kota.

Terakhir, efektivitas koordinasi ini harus didukung oleh kebijakan regulasi di tingkat daerah, seperti Peraturan Wali Kota yang secara spesifik mengatur standar akuntansi darurat lintas sektoral. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi para bendahara pengeluaran di setiap instansi untuk melakukan realokasi anggaran tanpa rasa takut akan sanksi administratif selama bencana terjadi. Dengan adanya sinkronisasi regulasi dan

pencatatan, Kota Medan dapat memiliki basis pertahanan fiskal yang kuat dalam menghadapi ancaman banjir bandang yang tidak terduga di masa depan.

Optimalisasi Standar Harga Satuan dalam Pengadaan Darurat

Penerapan prinsip Value for Money (VFM) pada aspek ekonomi menuntut efisiensi biaya dalam pengadaan logistik bencana di Kota Medan. Salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan bencana adalah ketidaksesuaian antara Standar Harga Satuan yang ditetapkan pemerintah dengan fluktuasi harga pasar yang melonjak saat banjir melanda. Di Medan, kenaikan harga bahan bangunan dan logistik pangan saat krisis sering kali membuat para pengelola keuangan ragu dalam melakukan eksekusi anggaran karena takut melanggar aturan plafon harga yang kaku.

Strategi akuntansi yang responsif dalam konteks ini adalah pengembangan Standar Harga Satuan darurat yang bersifat dinamis. Pemerintah Kota Medan perlu menyusun instrumen akuntansi yang memungkinkan penyesuaian harga satuan berdasarkan indeks inflasi lokal saat bencana terjadi. Hal ini sangat krusial agar perbaikan infrastruktur ekonomi, seperti rehabilitasi pasar tradisional di Medan Labuhan yang rusak akibat banjir, tidak terhenti hanya karena kendala administratif harga. Kepastian harga dalam pencatatan akuntansi memastikan bahwa aliran material untuk pemulihan fisik dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi pengadaan yang berbelit.

Selain aspek kepatuhan, optimalisasi Standar Harga Satuan juga berkaitan erat dengan efisiensi anggaran daerah secara keseluruhan. Tanpa standar harga yang jelas namun fleksibel, risiko pemborosan anggaran atau sebaliknya, kekurangan dana untuk layanan esensial, akan sangat tinggi. Strategi akuntansi penanggulangan mengharuskan adanya survei pasar berkala yang terintegrasi ke dalam sistem perencanaan anggaran bencana. Hal ini akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah Medan benar-benar memiliki nilai manfaat ekonomi yang optimal bagi proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascabanjir.

Dampak dari kebijakan harga yang tepat ini juga akan dirasakan oleh para penyedia jasa lokal di Medan. Sektor swasta akan lebih antusias terlibat dalam proyek-proyek pemulihan fisik daerah jika sistem pembayaran dan penetapan harga dilakukan secara adil dan akuntabel. Dengan demikian, akuntansi berperan dalam menggerakkan ekosistem ekonomi lokal melalui keterlibatan pihak ketiga dalam proses penanggulangan bencana. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta ini merupakan instrumen penting dalam mempercepat kembalinya aktivitas ekonomi normal di Kota Medan.

Sebagai penutup sub-bab ini, penting untuk ditekankan bahwa audit pengadaan dalam kondisi darurat harus tetap mengedepankan prinsip transparansi. Meskipun terdapat fleksibilitas dalam harga satuan, setiap transaksi wajib didokumentasikan dengan bukti yang sah untuk kepentingan pertanggungjawaban di akhir tahun anggaran. Akuntansi sektor publik di Medan harus mampu menunjukkan bahwa kebijakan darurat tidak mengabaikan prinsip tata kelola keuangan yang baik, melainkan mengadaptasi aturan tersebut agar lebih berdaya guna dalam situasi krisis demi keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Pemetaan Akuntansi Sosial-Ekonomi untuk Kawasan Tangguh Bencana

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Kota Medan memerlukan pendekatan Akuntansi Sosial-Ekonomi untuk memitigasi risiko di kawasan rawan bencana. Berdasarkan model analisis kerentanan ekonomi, akuntansi harus mampu melampaui angka-angka fiskal dan mulai menghitung dampak kesejahteraan masyarakat. Selama ini, laporan keuangan Pemko Medan hanya mencatat kerusakan aset pemerintah, namun mengabaikan hilangnya potensi pendapatan (opportunity cost) dari ribuan buruh dan pedagang di wilayah Medan Maimun yang tidak bisa bekerja selama banjir melanda.

Penerapan akuntansi sosial-ekonomi mengharuskan pemerintah daerah untuk memasukkan variabel Kerugian Sosial-Ekonomi Eksternal ke dalam analisis risiko tahunan. Dengan memetakan kawasan ekonomi berdasarkan nilai produktivitas dan tingkat kerentanannya, strategi akuntansi penanggulangan dapat beralih menjadi alat navigasi investasi. Misalnya, jika data akuntansi menunjukkan bahwa kerugian ekonomi tahunan akibat banjir di satu kecamatan melebihi biaya pembangunan bendungan, maka investasi infrastruktur tersebut menjadi sangat layak secara finansial dan strategis untuk segera dieksekusi.

Inovasi ini juga mendukung pembentukan kebijakan Kawasan Tangguh Bencana di Kota Medan. Strategi akuntansi dalam hal ini berfungsi sebagai penyedia data bagi pengambil kebijakan dalam memberikan insentif pajak atau subsidi bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem bangunan tahan banjir. Pencatatan akuntansi yang mendetail mengenai manfaat dari kebijakan tersebut akan meyakinkan legislatif untuk terus mendukung program ketahanan ekonomi daerah. Dengan demikian, akuntansi menjadi motor penggerak bagi terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih aman dan produktif.

Selain itu, pemetaan ini sangat berguna bagi sektor perbankan dan asuransi dalam menilai profil risiko kredit di Medan. Laporan akuntansi yang komprehensif mengenai kerentanan wilayah akan mempermudah warga dan pelaku UMKM dalam mengakses produk asuransi bencana atau pinjaman modal kerja dengan bunga yang kompetitif. Kehadiran instrumen keuangan ini akan menjadi pengaman tambahan bagi ekonomi masyarakat saat bantuan pemerintah belum tersalurkan. Akuntansi, dalam peran barunya ini, berfungsi menciptakan ekosistem keuangan yang resilien terhadap ketidakpastian alam.

Akhirnya, integrasi akuntansi sosial-ekonomi ke dalam pelaporan daerah akan meningkatkan kualitas demokrasi ekonomi di Kota Medan. Masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana dana pajak mereka digunakan untuk melindungi mata pencaharian warga yang paling rentan. Transparansi mengenai biaya bencana dan manfaat dari strategi penanggulangan akan mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga lingkungan dan mendukung kebijakan pemerintah daerah. Strategi akuntansi ini, pada akhirnya, adalah tentang keadilan ekonomi - memastikan bahwa tidak ada warga Medan yang tertinggal dalam proses pemulihan ekonomi pascabencana.

Integrasi Manajemen Bencana Terpadu dalam Kerangka Akuntabilitas Keuangan Daerah

Penerapan manajemen bencana yang sistematis sebagaimana dipaparkan dalam buku *Disaster Management* menekankan pentingnya koordinasi yang terstruktur dalam setiap fase bencana. Dalam konteks Kota Medan, prinsip manajemen ini harus diterjemahkan ke dalam sistem akuntansi sektor publik yang integratif. Akuntabilitas keuangan daerah tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh data lapangan yang valid dari tim penanggulangan bencana. Sinergi antara unit pelaksana manajemen bencana dengan bagian keuangan daerah menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran bencana benar-benar menyentuh kebutuhan krusial di lapangan.

Dalam perspektif akuntansi, manajemen bencana yang terpadu memungkinkan Pemerintah Kota Medan untuk melakukan penganggaran responsif. Hal ini berarti perencanaan anggaran tidak hanya didasarkan pada perkiraan angka tahun lalu, tetapi pada pemetaan risiko nyata yang diperbarui secara berkala. Akuntansi sektor publik berperan sebagai instrumen kontrol yang memastikan bahwa perpindahan dana dari kas daerah ke unit operasional di tingkat kecamatan dilakukan secara transparan. Tanpa manajemen yang terpadu, risiko tumpang tindih anggaran antara dinas kesehatan, dinas sosial, dan BPBD Medan sangat mungkin terjadi, yang pada akhirnya akan melemahkan efisiensi fiskal daerah.

Strategi penanggulangan melalui jalur akuntansi juga menuntut adanya pelaporan kinerja yang berkesinambungan. Setiap fase manajemen bencana—mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana—harus memiliki instrumen pencatatan biaya yang spesifik. Di Kota Medan, pencatatan ini sering kali terkendala oleh kurangnya literasi akuntansi di kalangan petugas lapangan. Oleh karena itu, penguatan manajemen bencana harus dibarengi dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan keuangan darurat yang sederhana namun tetap memenuhi kaidah audit pemerintahan.

Selain itu, manajemen bencana yang baik mensyaratkan adanya evaluasi pascakejadian. Dalam akuntansi, hal ini diwujudkan melalui audit kinerja pascabanjir. Auditor tidak hanya memeriksa kecocokan kuitansi, tetapi juga menilai apakah manajemen dana yang dilakukan telah memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat Medan. Evaluasi ini menjadi basis data penting untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya, sehingga Kota Medan memiliki siklus manajemen fiskal bencana yang terus meningkat kualitasnya dari tahun ke tahun.

Terakhir, integrasi manajemen bencana dalam akuntansi akan menciptakan sistem peringatan dini fiskal (*fiscal early warning system*). Dengan memantau tren pengeluaran bencana secara berkala, Pemerintah Kota Medan dapat memprediksi kapan cadangan dana darurat akan menipis dan kapan harus melakukan intervensi kebijakan baru. Manajemen yang berbasis data akuntansi ini akan menjamin stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga meskipun tekanan bencana banjir datang berulang kali, memastikan keberlanjutan layanan publik tanpa terhambat krisis keuangan.

Perspektif Kemanusiaan dalam Akuntansi Sosial dan Pemulihan UMKM

Buku *Disaster Management* memberikan penekanan kuat pada Perspektif Kemanusiaan dalam setiap tindakan penanggulangan. Dalam strategi akuntansi, perspektif ini diimplementasikan melalui Akuntansi Sosial yang memfokuskan pemulihan ekonomi pada kelompok yang paling rentan terdampak banjir di Medan. Akuntansi sosial melampaui perhitungan laba-rugi fiskal pemerintah dan mulai menghitung dampak bencana terhadap kesejahteraan manusia. Di kawasan seperti Medan Belawan dan Medan Maimun, kerugian ekonomi masyarakat kecil harus menjadi prioritas dalam pencatatan dan alokasi bantuan modal pascabencana.

Implementasi perspektif kemanusiaan dalam akuntansi berarti pemerintah harus mempermudah akses stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM tanpa membebani mereka dengan persyaratan administratif yang memberatkan di tengah masa sulit. Strategi penanggulangan ini melibatkan kebijakan afirmasi fiskal, di mana pencatatan bantuan modal kerja dilakukan dengan mekanisme verifikasi yang cepat dan berbasis komunitas. Hal ini krusial untuk mencegah para pelaku usaha kecil jatuh ke dalam jeratan pinjaman ilegal (*rentenir*) yang sering kali muncul sebagai solusi instan saat bantuan formal pemerintah terhambat oleh birokrasi pencatatan yang kaku.

Selain itu, akuntansi sektor publik harus mampu memotret biaya eksternalitas dari bencana, seperti biaya kesehatan masyarakat akibat banjir. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa bencana berdampak langsung pada kesehatan manusia; bagi ekonomi, hal ini berarti penurunan produktivitas kerja warga Medan. Akuntansi sosial-ekonomi mencatat penurunan produktivitas ini sebagai kerugian daerah. Dengan menyajikan data biaya kesehatan dan kehilangan hari kerja akibat banjir, pemerintah dapat menyusun argumen kuat untuk meningkatkan investasi pada infrastruktur pencegah banjir sebagai bentuk perlindungan kemanusiaan sekaligus pengamanan ekonomi.

Dalam konteks transparansi, perspektif kemanusiaan menuntut pemerintah untuk melaporkan penggunaan dana bencana secara terbuka kepada publik. Masyarakat Medan berhak mengetahui bagaimana dana bantuan disalurkan dan siapa saja yang menerimanya. Laporan akuntansi yang mudah dipahami oleh warga awam akan meningkatkan

kepercayaan publik dan memperkuat solidaritas sosial. Transparansi ini juga berfungsi sebagai alat kontrol agar bantuan tidak disalahgunakan, sehingga nilai kemanusiaan dari dana tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.

Secara strategis, akuntansi yang berbasis kemanusiaan mendorong terciptanya Ekonomi Berketahanan di tingkat akar rumput. Dengan memastikan aliran dana masuk ke sektor-sektor padat karya segera setelah banjir surut, Pemerintah Kota Medan sedang melakukan penyelamatan ekonomi secara humanis. Strategi ini membuktikan bahwa akuntansi bukan sekadar angka kering di atas kertas, melainkan instrumen kebijakan yang memiliki hati untuk melindungi martabat ekonomi masyarakat korban banjir.

Evaluasi Manajemen Risiko dan Strategi Mitigasi Fiskal Jangka Panjang

Manajemen bencana yang efektif mengharuskan adanya strategi mitigasi yang proaktif, bukan sekadar responsif. Berdasarkan teori manajemen risiko bencana dalam referensi buku tersebut, Pemerintah Kota Medan harus mulai menerapkan Akuntansi Mitigasi dalam perencanaan anggarannya. Strategi ini melibatkan pengalokasian dana yang lebih besar pada program pencegahan dan pengurangan risiko ekonomi sebelum banjir terjadi. Secara akuntansi, investasi pada pembangunan drainase dan tanggul sungai di Medan dicatat sebagai aset yang memiliki nilai manfaat jangka panjang dalam mengurangi potensi pengeluaran darurat di masa depan.

Strategi penanggulangan melalui mitigasi fiskal mencakup pembentukan dana abadi bencana atau catastrophe bond di tingkat lokal. Akuntansi sektor publik memfasilitasi pengelolaan dana ini agar tetap likuid namun memberikan imbal hasil yang dapat digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur pencegah banjir. Dengan memiliki manajemen risiko keuangan yang matang, Medan tidak akan lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan dana dari pemerintah pusat setiap kali terjadi bencana besar, sehingga kemandirian ekonomi daerah tetap terjaga.

Evaluasi berkala terhadap manajemen risiko juga harus melibatkan audit atas Kesiapsiagaan Keuangan. Hal ini mencakup pengecekan apakah dana Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Medan sudah mencukupi berdasarkan prediksi cuaca dan data historis banjir. Jika hasil analisis akuntansi menunjukkan kekurangan dana, pemerintah harus segera melakukan penyesuaian anggaran melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketajaman analisis akuntansi dalam memprediksi kebutuhan finansial adalah bentuk penanggulangan risiko yang paling efektif untuk mencegah kelumpuhan layanan publik saat krisis.

Lebih jauh lagi, strategi mitigasi fiskal ini harus diintegrasikan dengan rencana tata ruang kota. Akuntansi dapat memberikan data mengenai nilai ekonomi dari lahan-lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air di Medan. Jika alih fungsi lahan mengakibatkan peningkatan biaya penanggulangan banjir, maka akuntansi harus mampu menyajikan perbandingan biaya-manfaat tersebut kepada pengambil kebijakan. Dengan demikian, keputusan pembangunan di Medan akan didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang matang dan berwawasan bencana.

Sebagai penutup bagian pembahasan, penting untuk ditegaskan bahwa manajemen bencana yang sukses di Kota Medan adalah hasil dari perpaduan antara manajemen operasional yang tangguh dan strategi akuntansi yang akuntabel. Pendekatan kemanusiaan dalam pengelolaan keuangan akan menjamin bahwa pemulihan ekonomi pascabencana tidak hanya sekadar mengembalikan angka-angka statistik, tetapi benar-benar memulihkan kehidupan dan kesejahteraan warga Medan secara utuh dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Strategi akuntansi sektor publik merupakan instrumen vital yang tidak terpisahkan dalam siklus manajemen risiko bencana banjir di Kota Medan. Penyebab

kerugian ekonomi yang masif dapat dimitigasi melalui analisis kerentanan yang mendalam dan penanggulangan yang berbasis pada prinsip Value for Money.

Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang transparan, penyederhanaan birokrasi melalui akuntansi digital, serta pengakuan penurunan nilai aset yang akurat adalah langkah-langkah konkret untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabanjir. Pemerintah Kota Medan perlu memperkuat literasi akuntansi bencana di tingkat Organisasi Perangkat Daerah guna memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memberikan dampak nyata bagi ketahanan ekonomi daerah. Dengan tata kelola keuangan yang responsif dan akuntabel, Kota Medan dapat menjadi pelopor transformasi birokrasi modern yang mampu menyelaraskan kecepatan respons bencana dengan ketepatan administrasi keuangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen Bencana*. Bumi Aksara.
- Akuntansi. *Intermediate Accounting, Edisi Pertama*. Jakarta. Mulyadi. 2015. *Pengertian Akuntansi Menurut Para Ahli, Edisi Pertama*. Salemba Empat. Jakarta.
- Alfrianda. 2015. *Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengertian Aset*. Edisi 8. Salemba Empat. Jakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia.2015.
- Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat. Kieso, dkk. 2010.
- Auliana. 2010. *Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang*. Jurnal.Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Vol 3, No.3, hlm. 117-131.
- Baker, C. R. (2014). *Breakdowns Of Accountability In The Face Of Natural Disasters: The Case Of Hurricane Katrina*. *Critical Perspectives on Accounting*, 25(7), 620–632.
- BPS Kota Medan. (2025). *Kota Medan Dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kota Medan. <https://medankota.bps.go.id/>
- Carlson, S. J., & Parker, D. J. (1998). *Disaster recovery planning and accounting information systems*. *Review of Business*, Winter, 22–28.
- Hakim, A., Kumajas, L., & Adiandari, A. (2022). *Pengelolaan Dana Darurat Dan Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana*. *AKURASI*, 7(1), 19–32.
- Lai, A., Leoni, G., & Stacchezzini, R. (2014). *The socializing effects of accounting in flood recovery*. *Critical Perspectives on Accounting*, 25(7), 579–603.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Muhammad, M. M., & Rachman, V. S. (2022). *Emergency Fund Management Dalam Pemulihan Pasca Bencana*. *AKURASI*, 7(1), 19–32.
- Priatna, Y. (n.d.). *Pengelolaan Risiko Dan Akuntabilitas Keuangan Pasca Bencana*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Amli, S. (2018). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Dian Rakyat.
- Yusuf, Z. F. A., Saepudin, E. A., Kurnia, N. M., & Maulana, N. (2024). *Manajemen Bencana: Konsep Dan Penanggulangannya*. Rajawali Pers.
- Rahayu, S. E., Pohan, M., Febriaty, H., & Sofian, E. (2013). *Perekonomian Indonesia*. Perdana Publishing.
- Ritonga, P. (2021). *Keuangan negara*. UMSU Press.
- Sofyan, I. (2015). *Manajemen Strategi: Teknik Penyusunan serta Penerapannya untuk Pemerintah dan Usaha*. Yogyakarta. Graha Ilmu.